

## DAFTAR RUJUKAN

- Ainul, Soeidy dkk, (2014). Sinergi Pemerintahan Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan. *Jurnal JAP*. Vol. 1, No.2
- Al Mizon, S., Ahmad, B., & Mustika, D. (2018). Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Atik Husniawati, S., Rahmadi, R., & Alhusni, A. (2018). Penerapan Sanksi Hukum Adat Di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Arzam, A. (2017). Uang Adat Perkawinan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Dilembaga Adat Depati Atur Bumi). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(1), 1-12.
- Hamzah, A. (2017). Pewarisan Kebudayaan Dalam “Ico Pakai” Hukum Adat Masyarakat Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 15(1), 1-16.
- Hidayati, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemek Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 57-74.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Iswanto, I. (2020). Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 70-77.
- Iskandar, A. D. S (2018). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Mangrove Sebagai Relevansi Sustainable Development. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 307-322.
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. (2019). Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. *Journal of Civic Education*, 2(4), 363-370.

- Moelong , (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perdana, I. (2021). Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Journal Equitable*, 6(1), 14-26.
- Peraturan Desa Koto Dua Baru No. 04 Tahun 2019 tentang Uang adat Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No.111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Rumokoy, N. K. (2013). Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa berdasarkan Undang undang Nomor 12 tahun 2011. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3), 869.
- Safrijal, A. (2013). Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 145-162.
- Satria, I., & Ansori, R. (2020). Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Pranata Hukum*, 15(1), 66-81.
- Siombo, M. R., & SH, M. S. (2016). *Asas–asas Hukum Adat*.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat*.
- Sudirga, G. A. E. S., & Artha, I. G. Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat.
- Sudarma Putra, I. B. Hakikat Sanksi Adat Sangaskara Danda Terhadap Pelanggaran Adat Gamia Gamana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), 44-149.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.

Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40-50.

Yulia, S.H . M.H (2016) Buku Ajar Hukum Adat.